



Dumai
كوتة دوماي | Kota Idaman



RENCANA KERJA PERUBAHAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2025



[disnaker.dumai](https://www.instagram.com/disnaker.dumai)



disnaker.dumaikota.go.id



Jl. Kesehatan no 5 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur
Kota Dumai

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rencana Kinerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Pemda Kota Dumai yang memuat Visi, Misi dan Strategi kebijakan yang didasarkan kepada situasi, kondisi, potensi dan kebutuhan dan permasalahan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas yang diemban Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dirasakan masih ada kekurangan-kekurangannya, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi pelaksanaan tugas kedepan agar lebih baik lagi.

Dumai, Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19770524 199602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA	6
2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN	7
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	7
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN	10
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	10
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA	11
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	11
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	17
4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	17
BAB V : PENUTUP	18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen yang dimaksud adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Perubahan OPD (Renja Perubahan OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan OPD, Renja Perubahan OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Memperhatikan faktor-faktor keberhasilan, hambatan, evaluasi kinerja, serta isu-isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang sedang berkembang diantaranya :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
4. Program berdasarkan RKPD Perubahan tahun 2025 yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yaitu :

Urusan Wajib

- 1 Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- 2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 3 Program Penempatan Tenaga Kerja;
- 4 Program Hubungan Industrial;
- 5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transformasi serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan perencanaan komprehensif Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, sebagai dasar dan acuan ketentuan yuridis dan menyusun Rencana Kinerja Perubahan TA. 2025 adalah:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai;
15. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dari tiap Kecamatan di Kota Dumai.

1.3.2 Tujuan

Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja Perubahan, hubungan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja
- Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
- Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
- Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai
- Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja tahun 2025, capaian Rencana Kerja tahun 2024 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja. Realisasi program/kegiatan tahun 2025 yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sesuai tabel terlampir.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

A. Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Indikator kinerja untuk program ini yaitu Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dimana Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.

Beberapa manfaat nyata dari program pelatihan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas :

1. Mengurangi waktu pembelajaran yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kerja yang dapat diterima;
2. Membentuk sikap, loyalitas, dan kerja sama yang lebih menguntungkan;
3. Memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia;
4. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja;
5. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai

Berdasarkan telaahan permasalahan setiap pelaksanaan urusan daerah maupun telaahan terhadap Kajian lingkungan hidup strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai dan dokumen rencana pembangunan nasional serta provinsi, serta hasil diskusi dengan kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan hilir sebagai kabupaten tetangga maka dapat disimpulkan isu-isu strategis pembangunan kota Dumai tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi;
- Optimalisasi sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah;

- Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata;
- Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu;
- Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang;
- Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan; banjir dan rob; serta potensi penurunan muka tanah;
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan rumusan permasalahan-permasalahan pembangunan yang telah disepakati, maka isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD dengan mengacu pada isi-isu Strategis Pembangunan Kota Dumai selama kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tingginya Angka Pengangguran

Isu pengangguran perlu mendapat perhatian, pengangguran merupakan suatu pemborosan ekonomi yang sangat mahal karena tidak mempunyai mata pencaharian namun membutuhkan biaya untuk hidup sehari-hari. Selain itu penganggur memiliki potensi negatif yang besar yaitu dapat berdampak pada kerawanan sosial yang dapat mengganggu keamanan politik secara keseluruhan. Secara umum banyaknya penganggur dikarenakan terbatasnya lapangan kerja, jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja dan pendidikan tenaga kerja belum sepenuhnya sesuai dengan pasar kerja, maka kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada upaya perluasan lapangan kerja, dimana peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas sarana prasarana dan pengelolaan Rumah Terampil - Latihan Kerja yang berorientasi pada pasar kerja, serta pengembangan informasi pasar kerja, penempatan tenaga kerja, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan. Upaya penanganan pengangguran harus terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka

lapangan kerja baru dan kemudian aspek-aspek produktif tersebut mampu menjamin keberlanjutan pasar kerja.

2. Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja

Isu rendahnya kualitas tenaga kerja ditandai dengan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Angkatan kerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh mereka yang mempunyai pendidikan maksimal tamat SD, kemudian tamatan SLTP dan tamatan SLTA. Pendidikan tinggi merupakan bagian terkecil dari seluruh angkatan kerja. Kondisi ini perlu mendapat perhatian yaitu dengan menjembatani dunia pendidikan formal dengan dunia kerja. Pasar kerja mensyaratkan kompetensi dan kualifikasi diupayakan peningkatan kualitas dan kompetensinya melalui berbagai keterampilan di balai/lembaga pelatihan kerja dan dengan demikian diperlukan penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas calon tenaga kerja pada lembaga pelatihan.

3. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja.

Maraknya unjuk rasa pekerja diantaranya disebabkan masih lemahnya lembaga hubungan industrial. Tuntutan pekerja terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi Isu Strategis untuk penanganan ketenagakerjaan 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan perlindungan tenaga kerja ditujukan untuk menciptakan suasana hubungan industrial yang harmonis melalui perbaikan penghasilan (pemenuhan Upah yang layak dan berkeadilan diterima semua pihak) dan sarana hubungan industrial. Kurangnya perlindungan terhadap pekerja dapat dijelaskan bahwa masih adanya perilaku yang diskriminasi, adanya ketidaksetaraan, ketidakadilan antara yang diberikan pada tenaga kerja laki-laki dan perempuan, masih banyak anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI

3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung visi, misi presiden, agenda dan sasaran pembangunan nasional secara lebih terukur, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
2. Peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
3. Penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja, menciptakan rasa keadilan dalam dunia usaha dan pengembangan sistem pengawasan tenaga kerja;
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perencanaan program, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga yang transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja rating audit BPK;
6. Peningkatan kinerja institusi yang berkelanjutan;
7. Peningkatan kepuasan stakeholders dalam pelayanan perencanaan, penelitian dan pengembangan, data dan informasi ketenagakerjaan yang bermanfaat dan berkelanjutan.

Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai pada dasarnya selaras dengan sasaran dari Kementerian Ketenagakerjaan, yakni peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, peningkatan kualitas pelayanan penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan. Terdapat sedikit perbedaan sasaran pada Kementerian Ketenagakerjaan, yakni terkait dengan pengawasan ketenagakerjaan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja

Berdasarkan faktor internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai.

Sesuai Misi 1 (Pertama) yakni "*Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing*" dan Misi 3 (tiga) yakni "*Mewujudkan Perekonomian Kota Yang Produktif*", Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran selama 5 tahun kedepan. Tujuan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai adalah Memaksimalkan tenaga kerja bagi masyarakat Dumai dengan cara :

1. Melaksanakan Pelatihan Kerja (Workshop) yang berpusat di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Memprioritaskan Lowongan Kerja bagi penduduk Kota Dumai;
3. Mengembangkan dan memperbanyak usaha yang menyerap tenaga kerja di BUMD.

Ada pun Program dan Kegiatan yang direncanakan tersebut adalah terjemahan dari program prioritas Kepala Daerah Tahun 2025 untuk Bidang Tenaga Kerja yaitu: Penyediaan fasilitas pelatihan tenaga kerja sesuai standar sertifikasi internasional.

3.3 Program dan Kegiatan

Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah menurunnya Tingkat Pengangguran, yang diimplementasikan dalam sasaran program, yaitu : Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja dengan target kinerja adalah rasio tenaga kerja terampil dan produktif; Meningkatnya kesempatan kerja dengan target kinerja adalah persentasi penempatan terhadap pencari kerja terdaftar; Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan dengan target kinerja rasio penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial; serta Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan target kinerja adalah jumlah penempatan transmigran. Target kinerja ini merupakan dasar pertimbangan disusunnya Rencana Program dan Kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

Urusan Ketenagakerjaan acuan kinerjanya tercantum dalam 3 (tiga) Wali Kota Dumai yakni "Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat".

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Adapun tujuan strategis dari Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja;
2. Meningkatkan penempatan tenaga kerja dan menumbuhkan wirausaha baru;
3. Meningkatkan kesempatan dan perluasan kerja;
4. Mewujudkan hubungan industri yang harmonis, berkeadilan dan pelayanan penyelesaian kasus Hubungan Industrial/PHK dalam upaya perlindungan tenaga kerja;
5. Perlindungan dan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
6. Mewujudkan kualitas kerja yang efisien dan efektif dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
7. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Transmigrasi yang masih belum terselesaikan.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai menetapkan program-program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Penetapan program pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di bawah ini, Program yang mendukung adalah :

- **Program Perencanaan Tenaga Kerja;** Dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
- **Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;** Dengan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi
 - d. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
 - e. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- **Program Penempatan Tenaga Kerja;** Dengan Kegiatan Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
- d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- **Program Hubungan Industrial**; Dengan Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan

- Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afilias;
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;** Dengan Kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

V.I Rencana Kerja dan Pendanaan

Sesuai Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentang Perubahan RKPD bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai telah menyusun Rencana Kerja Perubahan TA. 2025 sesuai terlampir.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan sebagai awal dari Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai 2022-2026 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Walikota Dumai, serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang berumber dari anggaran APBD Kota Dumai Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025, maka penerapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintergrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Dumai.

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 di lingkup Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2025.

Oleh karena permasalahan dalam pembangunan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian terus berkembang, maka diperlukan prioritas dan arah pembangunan dari urusan ketenagakerjaan di Kota Dumai, maka pada tahun 2025 lebih difokuskan pada :

1. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian.

Dumai, Juli 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA DUMAI



SATRIO WIBOWO, A.P., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19770524 199602 1 002

LAMPIRAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA KOTA DUMAI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10- 12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.249.656.220,00	8.790.737.120,00	8.255.459.745,00	4.994.196.475,00							22.162.396.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							13.249.656.220,00	8.790.737.120,00	8.255.459.745,00	4.994.196.475,00							22.162.396.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang tenaga kerja DAERAH				100 %	100 %	6.330.456.220,00	5.086.537.120,00	4.963.985.831,00	1.366.470.389,00							8.727.396.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				5 Dokumen	4 Dokumen	66.000.000,00	25.000.000,00	23.405.532,00	41.594.468,00			-	-		Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	0 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	18.551.932,00	-3.551.932,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.853.600,00	5.146.400,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			17.160.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	3.468.487.120,00	3.468.487.120,00	3.737.593.160,00	-269.106.040,00				-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	4.105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	43 Orang/bulan	3.458.487.120,00	3.458.487.120,00	3.732.743.160,00	-274.256.040,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA ALOKASI ULMUM (DAU)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.850.000,00	5.150.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Perangkat Daerah			60 Orang	56 Orang	0,00	0,00	35.896.000,00	-35.896.000,00				-	-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	200.896.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	56 Paket	0,00	0,00	35.896.000,00	-35.896.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		35.896.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	12 Bulan	495.050.000,00	285.050.000,00	178.761.224,00	316.288.776,00				-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1.068.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	6.859.000,00	3.141.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12 Paket	12 Paket	85.000.000,00	80.000.000,00	46.815.001,00	38.184.999,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	16.389.400,00	13.610.600,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	10.000.000,00	5.673.323,00	9.326.677,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Dokumen	12 Dokumen	5.050.000,00	5.050.000,00	3.142.000,00	1.908.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	150.000.000,00	99.882.500,00	250.117.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			6 Paket	0 Paket	935.000.000,00	100.000.000,00	0,00	935.000.000,00			-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.560.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Unit	0 Unit	450.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel			10 Unit	0 Unit	70.000.000,00	50.000.000,00	0,00	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5 Unit	0 Unit	415.000.000,00	50.000.000,00	0,00	415.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	12 Bulan	1.013.619.100,00	873.000.000,00	781.399.915,00	232.219.185,00			-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	1 Laporan	122.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-78.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1 Laporan	1 Laporan	886.619.100,00	668.000.000,00	578.899.915,00	307.719.185,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			4 Paket	3 Paket	343.300.000,00	325.000.000,00	201.930.000,00	141.370.000,00			-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	523.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				8 Unit	8 Unit	208.300.000,00	190.000.000,00	107.720.000,00	100.580.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				65 Unit	65 Unit	40.000.000,00	40.000.000,00	30.230.000,00	9.770.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	63.980.000,00	31.020.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		198.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RTKD		100 %	100 %	150.000.000,00	100.000.000,00	73.356.116,00	76.643.884,00						250.000.000,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja		75 %	75 %	150.000.000,00	100.000.000,00	73.356.116,00	76.643.884,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	73.356.116,00	76.643.884,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN		10 %	10 %	1.925.000.000,00	525.000.000,00	237.016.007,00	1.687.983.993,00						4.320.000.000,00	

2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi			644 Orang	10 Orang	1.800.000.000,00	400.000.000,00	80.540.500,00	1.719.459.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai		3.670.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi																		
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n			200 Orang	10 Orang	1.000.000.000,00	100.000.000,00	50.540.500,00	949.459.500,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			2.083.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja			4 Unit	2 Unit	800.000.000,00	300.000.000,00	30.000.000,00	770.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			1.586.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS			100 %	100 %	0,00	0,00	36.480.900,00	-36.480.900,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			0 Lembaga	16 Lembaga	0,00	0,00	36.480.900,00	-36.480.900,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS			100 %	100 %	0,00	0,00	9.569.000,00	-9.569.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			0 Perizinan	10 Perizinan	0,00	0,00	9.569.000,00	-9.569.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	

2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil			100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	47.518.307,00	2.481.693,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Perusahaan Kecil di Kota Dumai	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas			20 Perusahaan	20 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	47.518.307,00	2.481.693,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Produktivitas Tenaga Kerja			25 %	25 %	75.000.000,00	75.000.000,00	62.907.300,00	12.092.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Pencari Kerja yang terdaftar di Dinas Kota Dumai	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	62.907.300,00	12.092.700,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA		40 %	40 %	835.000.000,00	470.000.000,00	405.918.041,00	429.081.959,00						2.800.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan dan Diberdayakan		40 %	40 %	450.000.000,00	250.000.000,00	215.809.644,00	234.190.356,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja																
		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan			300 Orang	300 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	79.130.594,00	-29.130.594,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULID			20 Orang	20 Orang	150.000.000,00	100.000.000,00	85.630.300,00	64.369.700,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja			100 Orang	50 Orang	250.000.000,00	100.000.000,00	51.048.750,00	198.951.250,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			100 %	0 %	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	LPTKS Terdaftar di Disnaker Kota Dumai		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku			0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja			85 %	85 %	315.000.000,00	150.000.000,00	118.394.041,00	196.605.959,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	50.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			0 Orang	200 Orang	0,00	0,00	4.370.716,00	-4.370.716,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHAN AN			200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																	

			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	100.000.000,00	49.023.325,00	200.976.675,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran			85 %	85 %	70.000.000,00	70.000.000,00	71.714.356,00	-1.714.356,00				Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya			30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	65.724.356,00	-15.724.356,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Telayari sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani			0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PAJAK DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan			25 Orang	25 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	5.990.000,00	14.010.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN			95 %	95 %	4.009.200.000,00	2.609.200.000,00	2.575.183.750,00	1.434.016.250,00						6.065.000.000,00		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial			85 %	85 %	430.000.000,00	130.000.000,00	140.750.950,00	289.249.050,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			20 Perusahaan	20 Perusahaan	15.000.000,00	15.000.000,00	13.410.000,00	1.590.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPSELABUHAN AN		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																	

			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama			10 Perusahaan	10 Perusahaan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.430.950,00	2.569.050,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamostek serta Pengupahan			5 Laporan	5 Laporan	400.000.000,00	100.000.000,00	114.910.000,00	285.090.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial			100 %	100 %	3.579.200.000,00	2.479.200.000,00	2.434.432.800,00	1.144.767.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	5.065.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah			20 Perkara	20 Perkara	20.000.000,00	20.000.000,00	10.800.000,00	9.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan			50 Perkara	50 Perkara	50.000.000,00	50.000.000,00	26.820.000,00	23.180.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi																	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi			29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000,00	9.200.000,00	6.945.800,00	2.254.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			1 Lembaga	1 Lembaga	250.000.000,00	100.000.000,00	103.847.000,00	146.153.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0005	Pembangunan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																	
			Tetapannya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			16000 Orang	11300 Orang	3.250.000.000,00	2.300.000.000,00	2.286.020.000,00	963.980.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPERLABUHAN		4.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
J U M L A H								13.249.656.220,00	8.790.737.120,00	8.256.459.745,00	4.994.196.475,00						22.162.396.000,00	

2	7	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	43	3.732.743.160,00	43	3.732.743.160,00	-	
2	7	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	4.850.000,00	1	4.850.000,00	-	
2	7	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	-	
2	7	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	-	
2	7	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	1	35.896.000,00	1	35.896.000,00	-	
2	7	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	56	35.896.000,00	56	35.896.000,00	-	
2	7	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	-	0	-	-	
2	7	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	178.761.224,00	12	178.761.224,00	-	
2	7	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.859.000,00	12	6.859.000,00	-	
2	7	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	46.815.001,00	12	46.815.001,00	-	
2	7	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	16.389.400,00	12	16.389.400,00	-	
2	7	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.673.323,00	12	5.673.323,00	-	
2	7	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	3.142.000,00	12	3.142.000,00	-	
2	7	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	99.882.500,00	1	99.882.500,00	-	
2	7	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	0	0	0	0	-	

2	7	1	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	-	-
2	7	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	-	-
2	7	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	-	10	-	-	-
2	7	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	-	5	-	-	-
2	7	1	2.07	00010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	-	-
2	7	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	844.399.915,00	12	781.399.915,00	- 63.000.000,00	
2	7	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	-	-
2	7	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	-	-
2	7	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	641.899.915,00	1	578.899.915,00	- 63.000.000	-
2	7	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Paket	4	201.930.000,00	4	201.930.000,00		-
2	7	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	8	107.720.000,00	8	107.720.000,00	-	-
2	7	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	65	30.230.000,00	65	30.230.000,00	-	-
2	7	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	63.980.000,00	1	63.980.000,00	-	-

2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan RTKD	%	100	73.356.116,00	100	73.356.116,00	-	
2	7	2	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dg Rencana Tenaga Kerja	%	75	-	75	73.356.116,00	-	
2	7	2	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	40	73.356.116,00	40	73.356.116,00	-	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	%	10	237.016.007,00	10	237.016.007,00	-	
2	7	3	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	10	80.540.500,00	10	80.540.500,00	-	
2	7	3	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	10	50.540.500,00	10	50.540.500,00	-	
2	7	3	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana	Unit	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	-	
2	7	3	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS	%	100	36.480.900,00	100	36.480.900,00	-	
2	7	3	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	16	36.480.900,00	16	36.480.900,00	-	
2	7	3	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase Peningkatan pemahaman ttg perizinan pada LPKS	Perizinan	10	9.569.000,00	10	9.569.000,00	-	
2	7	3	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	10	9.569.000,00	10	9.569.000,00	-	
2	7	3	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil	%	100	47.518.307,00	100	47.518.307,00	-	
2	7	3	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	20	47.518.307,00	20	47.518.307,00	-	
2	7	3	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan	%	25	62.907.300,00	25	62.907.300,00	-	
2	7	3	2.01	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	62.907.300,00	1	62.907.300,00	-	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	%	35	405.918.041,00	35	405.918.041,00	-	

2	7	4	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan	%	40	215.809.644,00	40	215.809.644,00	-	
2	7	4	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	-	0,00	-	-	-	
2	7	4	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AK	Orang	-	0,00	-	-	-	
2	7	4	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	300	79.130.594,00	300	79.130.594,00	-	
2	7	4	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	20	85.630.300,00	20	85.630.300,00	-	
2	7	4	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	50	51.048.750,00	50	51.048.750,00	-	
2	7	4	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan dan Pengendalian LKPTS	Lembaga	0	-	0	-	-	
2	7	4	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	-	-	-	-	-	
2	7	4	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja	%	85	118.394.041,00		118.394.041,00	-	
2	7	4	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	2	65.000.000,00	2	65.000.000,00	-	
2	7	4	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	200	4.370.716,00	200	4.370.716,00	-	
2	7	4	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	50	49.023.325,00	50	49.023.325,00	-	
2	7	4	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	%	85	71.714.356,00	85	71.714.356,00	-	
2	7	4	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	30	65.724.356,00	30	65.724.356,00	-	

2	7	4	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	25	5.990.000,00	25	5.990.000,00	-	
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Menurunnya Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun	%	95	2.575.183.750,00	95	2.575.183.750	-	
2	7	5	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial	%	85	140.750.950,00	85	140.750.950,00	-	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLK Online	Perusahaan	20	13.410.000,00	20	13.410.000,00	-	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	10	12.430.950,00	10	12.430.950,00	-	
2	7	5	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	114.910.000,00	5	114.910.000,00	-	
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	85	2.434.432.800,00	85	2.434.432.800,00	-	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	20	10.800.000,00	20	10.800.000,00	-	
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	50	26.820.000,00	50	26.820.000,00	-	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	29	6.945.800,00	29	6.945.800,00	-	

2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	103.847.000,00	1	103.847.000,00	-	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	11.300	2.286.020.000,00	11.300	2.286.020.000,00	-	
TOTAL									8.318.459.745,00		8.255.459.745,00	-	63.000.000

Dumai, Juli 2025
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KOTA DUMAI,



SATRIO WIBOWO, A.P, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19770524 199602 1 002